

Padi *Berume* sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan di Desa Pangkal Niur Kabupaten Bangka: Pelestarian Kearifan Lokal di Tengah Terpaan Kerentanan

Harmin¹, Ebin², Ilham Rizki Juliansyah³, Herza Herza⁴

¹ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: harminlah1@gmail.com

² Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: ebinlionel@gmail.com

³ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: juliansyahilham17@gmail.com

⁴ Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung

E-mail: herzazul@ubb.ac.id

Abstract. *This study aims to explore in depth the reasons why the majority of the Pangkal Niur Village community maintains the tradition of berume dryland rice farming amid various vulnerabilities, examine the manifestations of the reasons why the Pangkal Niur Village community maintains the tradition of dryland rice farming today, and analyze the local government's response to the vulnerabilities faced by dryland rice farmers. In this study, the researcher used a qualitative research method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using Pierre Bourdieu's social practice theory, which includes the concepts of habitus, capital, and arena. The results of the study show that there are several motives for the persistence of the berume tradition, including: (1) the manifestation of habitus that has become a tradition passed down from generation to generation; (2) the rationality that berume is more economical than paddy fields; (3) berume is a form of local food security; (4) the existence of mutual cooperation and togetherness values that continue to be upheld. In addition, the berume tradition is manifested in: (1) the continued use of traditional subsistence methods amid the modernization of farmers; (2) the use of berume rice in the nisab and memere/ngebaru (ngeberas baru) traditions; (3) intercropping rice fields with 1-3-year-old oil palm trees; (4) preserving forests because they are considered a source of freedom. The government, through the Bangka Food and Agriculture Agency, has released local rice varieties and distributed fertilizers and pesticides, although the focus is now on paddy rice because it has a higher yield.*

Keywords : Berume; Motif; Manifestation; Government Response

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam alasan mayoritas masyarakat Desa Pangkal Niur mempertahankan tradisi berume padi ladang di tengah berbagai kerentanan, menelaah manifestasi dari alasan masyarakat Desa Pangkal Niur mempertahankan tradisi berume pada masa kini, serta menganalisis respons pemerintah daerah terhadap kondisi kerentanan yang dihadapi petani padi ladang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, yang meliputi konsep habitus, modal, dan arena. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa motif masih bertahannya tradisi berume di antaranya: (1) perwujudan habitus yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari setiap generasi; (2) alasan rasionalitas berume lebih ekonomis dibandingkan padi sawah; (3) berume merupakan ketahanan pangan versi lokal; (4) adanya nilai gotong royong dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Selain itu, tradisi berume dimanifestasikan dengan: (1) masih menerapkan cara tradisional subsisten di tengah modernisasi petani; (2) beras berume digunakan pada tradisi nisab dan memere/ngebaru (ngeberas baru); (3) tumpangsari padi ladang di tengah tanaman sawit yang berusia 1-3 tahun; (4) menjaga hutan karena dianggap sebagai kebebasan. Pemerintah melalui Dinas Pangan dan Pertanian Bangka melepas varietas padi lokal serta menyalurkan pupuk dan pestisida, meski kini fokus pada padi sawah karena produksinya lebih tinggi.*

Kata Kunci : Berume; Motif; Manifestasi; Respon Pemerintah

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 saat ini sebagai acuan penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ada di Indonesia. Peraturan ini mengatur percepatan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang memperhatikan kearifan lokal. Menurut Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) dalam merealisasikan program swasembada pangan Indonesia harus memiliki lumbung pangan dimulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga desa. Menurut Prabowo lumbung pangan merupakan kearifan masyarakat dari mulai zaman nenek moyang ribuan tahun yang lalu (Badan Pangan Nasional, 2025).

Tidak hanya di tingkat nasional, isu ketahanan pangan juga menjadi satu dari tujuh belas tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Zero hunger*/tanpa kelaparan merupakan program nomor dua setelah program *No Poverty*/tanpa kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB. *Zero Hunger* merupakan program yang berfokus pada menghilangkan kelaparan dan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan.

Berbicara dalam konteks kearifan lokal masyarakat, kondisi berbeda justru terlihat di wilayah pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini memiliki kearifan lokal dalam menghasilkan komoditas pangannya sendiri. Masyarakat Bangka Belitung menyebutnya sebagai *berume* atau padi ladang. Pertanian ladang dilakukan dengan memanfaatkan lahan kering melalui proses pembukaan hutan dengan cara penebangan dan pembakaran vegetasi yang ada (Harini, 2020).

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kini memfokuskan swasembada pangan pada pertanian padi sawah dengan sentra di Kabupaten Bangka Selatan (Marlianto, 2025). Peningkatan indeks penanaman sudah mulai berlangsung di beberapa desa tepatnya di Desa Rias, Desa Serdang, Desa Pergam, Desa Kepoh, Desa Gudang, Desa Sebagian dan Desa Betumpang dengan target kebutuhan ketahanan pangan sebesar 60 persen persediaan di Bangka Belitung terpenuhi. Orientasi pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat yang fokus pada pertanian sawah seperti pembangunan infrastruktur bendungan, irigasi, pemberian bibit unggul, alsintan (alat mesin pertanian) penyuluhan, dan pelatihan petani akan membuat petani tradisional padi ladang kesulitan berkembang akibat kurangnya dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah.

Menurut data lima tahun terakhir dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2020 luas tanam total padi sawah dan padi ladang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 20.455,9 hektar, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 13.459,9 hektar, pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 11.106,90 hektar, dan pada tahun 2023 naik menjadi 17.225 hektar. Data tersebut menunjukkan terjadinya fluktuasi luas tanam total padi sawah dan padi ladang, meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan seluas 6.118,10 hektar, tetapi dibandingkan data tahun 2020 data tersebut masih menunjukkan adanya penurunan seluas 3.230,9 hektar. Penurunan luas total tanam dan penurunan luas lahan pertanian terkhususnya pertanian ladang yang menjadi komoditas lokal menunjukkan mulai bergesernya arah pertanian tradisional masyarakat Bangka Belitung.

Tabel.1 Data Luas Panen (Ha) dan Jumlah Produksi (Ton) Padi Ladang di Kabupaten Bangka Tahun 2020–2024

Padi Ladang		
Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2020	4.032,00	7.022,25
2021	3.058,20	7.079,50
2022	3.133,70	7.524,60
2023	2.365,95	5.911,30
2024	2.317,17	5.450,90

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka
(dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka 2020–2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, luas panen padi ladang di Kabupaten Bangka cenderung mengalami penurunan pada lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2022 mengalami penambahan luas panen seluas 75,5 hektar dibandingkan tahun 2021, namun angka tersebut masih selisih dengan luas panen pada tahun 2020 yakni sebesar 898,3 hektar. Begitu pula hasil produksi padi ladang di Kabupaten Bangka lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020–2022 mengalami kenaikan sebanyak 502,35 hektar. Tetapi angka tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 2023 hasil produksi padi ladang menurun sebanyak 1.613,3 hektar dan 2024 mengalami penurunan sebanyak 460,4 hektar.

Berdasarkan pengamatan pra penelitian beberapa desa sudah banyak masyarakat yang mulai meninggalkan pertanian padi ladang karena beberapa faktor seperti minimnya ketersediaan lahan, cuaca yang tidak menentu, dan serangan hama. Persoalan ketersediaan lahan yang semakin terbatas disebabkan oleh masyarakat lebih memilih menanam kelapa sawit karena perawatan yang lebih mudah serta bisa dikomersialisasi. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti bersama kepala Desa Pangkal Niur, ketidaksesuaian cuaca merujuk pada kondisi musim panas dan hujan yang tidak mengikuti siklus tahunan. Dari sisi serangan hama, menurut wawancara prapenelitian beberapa jenis hama seperti tikus, monyet dan burung pipit sulit untuk dikendalikan. Tantangan lainnya yang membuat banyaknya desa di Bangka Belitung meninggalkan padi ladang adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, beras sebagai hasil aktivitas *berume* yang kurang bernilai komersial serta generasi muda yang tidak mau menggeluti aktivitas *berume*.

Di tengah persoalan sebagaimana yang dijelaskan di atas, masyarakat Desa Pangkal Niur menunjukkan pengecualian. Mayoritas masyarakat di sana masih mempertahankan aktivitas *berume* padi ladang. Bahkan, di tengah masyarakat memilih untuk menanam sawit, banyak dari mereka memanfaatkan di sela-sela lahan sawit (usia 1-3 tahun) untuk ditanami padi ladang. Selain itu, masyarakat Pangkal Niur rela menolak tawaran menggiurkan dari perusahaan sawit untuk membeli lahan masyarakat demi menjaga keberadaan lahan tersebut. Menurut Sumalia (2020) masyarakat Pangkal Niur melakukan aksi penolakan ke gedung DPRD karena adanya perencanaan pembangunan PT sawit oleh pihak swasta.

Berdasarkan penjelasan dan masalah yang telah diuraikan, maka tim peneliti tertarik mengeksplor lebih jauh berkenaan dengan mengapa masyarakat Desa Pangkal Niur tetap berupaya melestarikan aktivitas *berume* di tengah banyaknya persoalan dan kerentanan sebagaimana yang telah dijelaskan, apakah padi *berume* menjadi identitas penting bagi mereka atau ada alasan rasionalitas lainnya. Lebih jauh, fokus lainnya yang menjadi penting untuk diteliti adalah bagaimana masyarakat memanifestasikan dalam kehidupan praktis berkenaan dengan motif dan alasan mereka mempertahankan aktivitas *berume*. Terakhir peneliti juga akan menggali bagaimana reaksi pemerintah daerah terhadap persoalan dan kerentanan yang dialami masyarakat Pangkal Niur dalam aktivitas *berume*. Padahal praktik bertani padi ladang di Desa Pangkal Niur bisa menjadi pilihan alternatif dalam upaya diversifikasi pangan, terutama karena masyarakat telah memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal dalam budidaya padi ladang. Menurut Nopriyansyah, dkk., (2024) jenis padi ladang yang di kembangkan oleh petani bangka (termasuk Desa Pangkal Niur) menjadi varietas lokal yang sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Fenomena ini dianalisis menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Pada teori Bourdieu ini terdapat tiga konsep penting dalam memahami praktik sosial di antaranya habitus, modal, dan arena dengan rumus generatif ($\text{habitus} \times \text{modal}$) + ranah = praktik (Krisdinanto, 2014). Pertama, habitus adalah seperangkat struktur mental maupun kognitif lewat mana orang berurusan dengan dunia sosial (Ritzer, 2012). Habitus menurut Bourdieu dalam Ginting (2019) merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak, dan dianggap sebagai kemampuan yang tampak alami, yang tumbuh dan berkembang dalam konteks atau lingkungan sosial tertentu. Kedua, arena/medan (*field*) menurut Mustikasari (dalam Ismoyo, 2024) merupakan ruang sosial di mana terdapat aturan dan struktur yang mengatur di dalamnya, ruang para aktor saling berkompetisi dengan modal yang dimiliki untuk memperoleh sumber daya berupa materi dan kekuasaan simbolis. Bourdieu dan Wacquant (dalam Ritzer, 2012) melihat arena sebagai

arena pertempuran juga sebagai arena perjuangan. Terakhir, Modal berfungsi sebagai sumber daya bagi aktor atau agen untuk mendapatkan kekuatan dan kesempatan. Dalam hal ini, Bourdieu membagi modal menjadi empat macam yakni, modal ekonomi (kepemilikan alat-alat produksi, materi dan uang), modal budaya (nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan baik diperoleh secara formal dan non-formal), modal sosial (jaringan sosial atau relasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok kepada pihak lain), dan modal simbolik (pengakuan, prestise, status sosial, kehormatan dan gengsi).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2025) merupakan metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme dengan fokus pada obyek yang alamiah, (lawan dari teknik pengumpulan data eksperimen) di mana tugas peneliti kualitatif sebagai instrumen utama/kunci dengan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), sifat analisis data induktif/kualitatif dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan studi kasus. Studi kasus merupakan mekanisme kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan mendalam, intensif dan terperinci untuk menggali suatu peristiwa, program, aktivitas yang bisa dilakukan pada konteks individu, sekelompok orang, lembaga maupun organisasi dengan tujuan mendapatkan pengetahuan mendalam dari peristiwa tertentu.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pemilihan informan berdasarkan pengetahuan tentang apa yang ingin diteliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun informan yang dimaksud ialah Kepala Desa Pangkal Niur, dua orang perangkat desa, kepala dusun satu, kepala dusun dua (ketua gapoktan), ketua RT empat belas, lima orang petani padi ladang, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Adapun data yang diperoleh berupa data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokus di Desa Pangkal Niur. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi studi kepustakaan (karya tulis ilmiah, buku, e-book, maupun menelusuri situs web resmi). Data yang telah didapatkan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yakni data collection, data reduction, data display/, and conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Alasan Tradisi *Berume* di Pangkal Niur Masih Bertahan di Tengah Kerentanan

Berume dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai berhuma yang artinya aktivitas tanam-menanam padi atau pekerjaan yang dilakukan di lahan kering (ladang) dengan lahan yang hutannya baru ditebas. *Berume* merupakan aktivitas menanam padi di lahan kering yang dilaksanakan oleh petani tradisional yang tinggal di pedesaan. Aktivitas *berume* di Desa Pangkal Niur yang masih tetap eksis sampai saat ini tampak nyata perwujudan dari habitus masyarakat yang sudah diturunkan dari zaman nenek moyang dan dalam pikiran masyarakat Desa Pangkal Niur dianggap penting sehingga terus dilestarikan sampai saat ini. Menurut Pierre Bourdieu habitus yang ada pada satu waktu tertentu terbentuk melalui rangkaian sejarah kolektif. Artinya, habitus merupakan produk sejarah yang menghasilkan praktik-praktik bagi individu dan kelompok, tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terbentuk dari proses sejarah kolektif (Bourdieu dalam Ritzer, 2012). Selain itu, habitus juga dipahami sebagai struktur mental kognitif yang sudah diinternalisasi melalui struktur-struktur di luar individu atau masyarakat itu sendiri kemudian menuntun pada tindakan praktis. Masyarakat menganggap *berume* sebagai identitas yang harus dipertahankan dan dilestarikan, hal ini di tunjukkan ketika hasil dari beras *berume* ditampilkan dalam acara peringatan

hari besar keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, tradisi budaya keagamaan misalnya pada saat tahlilan dan yasinan, serta pada tradisi *memere* dan *nisab*. Anggapan sebagai identitas inilah kemudian menjadi struktur mental kognitif yang menuntun tindakan praktis masyarakat untuk tetap mempertahankan *berume*.

Bertahannya tradisi *berume* di Desa Pangkal Niur menandakan masih berdaulatnya masyarakat petani atas kebutuhan pokok utama yaitu beras. Menurut hasil wawancara dengan kepala desa, mayoritas sekitar 85% masyarakat Desa Pangkal Niur masih mempertahankan tradisi ini. Meskipun setiap tahunnya angka ini akan terus mengalami penurunan sejalan dengan ketersediaan lahan yang mulai sempit. Pada tahun 2024 petani padi ladang mampu menanam padi seluas 150 hektar dalam satu tahun.

Masyarakat Pangkal Niur menganggap bahwasanya *berume* lebih rasional dan ekonomis ketimbang menggarap padi sawah. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan yakni: 1) padi ladang lebih ekonomis dalam artian biaya perawatan padi ladang yang berupa pupuk dan pestisida cenderung lebih minim karena padi ladang tidak memerlukan pupuk secara berkala cukup satu kali saja setelah ditanam, berbeda dengan padi sawah yang harus dipupuk secara berkala, 2) padi ladang tidak memerlukan irigasi laiknya padi sawah sehingga membuat padi ladang lebih praktis dari segi perawatan, 3) padi ladang lebih tahan hama sehingga tidak butuh banyak pestisida untuk penyemprotan yang dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu pada padi sawah, 4) faktor tanah turut diperhitungkan, tanah kering serta mudah dibakar sangat tepat untuk menanam padi ladang. Berbanding lurus dengan yang dikemukakan oleh Suardi dkk, (2023) menurutnya rasionalitas seorang petani tidak hanya semata-mata didasarkan pada upaya memaksimalkan keuntungan ekonomi dari kegiatan usaha tani nya, tetapi juga mencakup aspek sosial (kultural) dan lingkungan yang memengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan usaha tani.

Praktik *berume* mencerminkan lebih dari sekadar keputusan rasionalitas secara ekonomi, juga turut merepresentasikan strategi ketahanan pangan yang telah mengakar dalam kehidupan dan pandangan hidup masyarakat Pangkal Niur. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 merupakan suatu keadaan terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, beragam, aman, bergizi, merata dan bisa dijangkau, tidak berlawanan dengan agama, keyakinan, budaya. Masyarakat serta untuk dapat bertahan hidup, sehat, aktif dan tetap produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan turut menjadi aspek pokok yang menjadi acuan masyarakat untuk tetap meneruskan aktivitas *berume*. Ketika persediaan pokok berupa beras masih ada di rumah maka masyarakat tidak perlu khawatir ketergantungan dengan beras komersial yang harganya terus mengalami kenaikan. Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal inilah menjadi struktur mental kognitif atau cara berpikir masyarakat yang menuntun Tindakan praktis masyarakat untuk tetap *berume*. Menurut hasil wawancara persediaan beras dari aktivitas *berume* biasanya cukup digunakan oleh setiap keluarga dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang.

Di samping itu, praktik *berume* juga tidak bisa dilepaskan dari modal sosial yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong dan solidaritas yang masih kuat terjaga menjadi bagian dari habitus masyarakat, tertanamnya kebiasaan saling bekerja sama serta membantu antar anggota keluarga maupun masyarakat, saling menjaga silaturahmi bukan semata tindakan karena aturan maupun kewajiban formal, tapi turut menjadi bagian cara pikir masyarakat yang menuntun tindakan praktis masyarakat untuk melakukan gotong royong dan menjaga solidaritas. Masih mempertahankan kebiasaan lama artinya nilai gotong royong masih akan tetap hidup. Desa yang menggunakan semboyan *betulong bekepong* (gotong royong) itu terlihat nyata nilai solidaritasnya di dalam praktik *berume*. Sehingga jika sikap solidaritas ini masih ada, *berume* akan tetap bertahan. Nilai kebersamaan tidak kalah penting, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga mencakup sisi moral serta emosional yang mempersatukan masyarakat. di mana kebersamaan ini tampak saat pascapanen padi ladang, masyarakat melaksanakan tradisi yang memiliki sebutan *memere/ngebaru* (ngeberas baru) dan *nisab*.

b. Manifestasi dari Motif Tradisi *Berume* sebagai Bentuk Adaptasi dan Resistensi di Tengah Kerentanan

Aktivitas *berume* di Desa Pangkal Niur sampai saat ini masih konsisten dilestarikan dengan tetap menggunakan cara-cara yang tradisional. *Berume* sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat petani padi ladang Pangkal Niur sebagai bentuk ketahanan pangan lokal versi masyarakat. Pada penerapannya mulai dari menanam/*nugal* hingga panen/*ngetam* masih mengadopsi cara tradisional tanpa adanya modernisasi. *Nugal* dilakukan oleh para laki-laki dengan dua batang galah untuk melubangi tanah, sementara perempuan mengikuti dari belakang untuk memasukkan butiran padi ke dalam lubang. Proses *ngetam* pun dilakukan menggunakan sabit khusus memanen. Pascapanen beras hasil *berume* hanya untuk dikonsumsi oleh keluarga untuk satu tahun mendatang dan tidak untuk dikomersialisasi. Kebiasaan ini menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” disebut sebagai *subsistence farming* yaitu cara bertani yang masih menggunakan cara tradisional dan tidak efisien dalam mekanisme pengelolaan pertanian serta hasil pertanian lazim digunakan hanya untuk kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dikomersialisasi. Sedangkan pada buku *the moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in southeast asia* yang ditulis oleh James C. Scott disebut sebagai perilaku subsisten (Febriani dan Risdayani, 2017).

Pada arena pangan ini petani padi ladang dengan modal budaya berupa pengetahuan tradisional *berume* harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada swasembada pangan padi sawah yang ada di Bangka Belitung terkhususnya Bangka Selatan. Kondisi ini membuat petani harus berada diposisi yang cukup lemah sehingga petani harus memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tetap bisa *berume*. Satu sisi dalam proses *berume* petani membutuhkan modal ekonomi berupa pasokan pupuk dan ketersediaan pestisida.

Selain itu, manifestasi pada tradisi *berume* ini bisa terlihat ketika masyarakat Pangkal Niur masih tetap mempertahankan dua tradisi pascapanen yaitu *memere/ngebaru* dan *nisab*. *Memere* merupakan sebuah tradisi yakni berupa doa-doa dan makan-makan dari hasil beras *berume* yang telah mereka panen. Setiap keluarga yang telah selesai melakukan panen biasanya mengundang sanak saudara serta masyarakat sekitar untuk turut hadir dalam rangkaian kegiatan pascapanen, yang meliputi prosesi doa bersama hingga momen simbolis mencicipi beras hasil panen baru. *Nisab* merupakan kegiatan sosial membagikan hasil beras yang baru kepada masyarakat yang membutuhkan seperti masyarakat miskin yang ada di Desa Pangkal Niur. *Nisab* sendiri berarti cukup, dengan ketentuan apabila suatu keluarga mendapatkan panen sebanyak 700 kg beras jenis mukot dan balok, 700 lebih kg untuk jenis beras mayang. Maka keluarga tersebut akan melaksanakan nisab sebesar 25% dari hasil yang sudah ditetapkan untuk *nisab*.

Di samping itu, para petani harus menghadapi tantangan ekspansi perkebunan sawit. Petani padi ladang harus menjalankan kebiasaan *berume* dengan menggunakan metode tumpangsari di tengah tanaman sawit. Menurut Putra dkk. (dalam Yuliani dkk., 2022) tumpangsari merupakan sistem menanam yang membudidayakan lebih dari satu tanaman yang ditanam pada waktu bersamaan. Pada pelaksanaannya petani menanam padi ladang di tengah tanaman sawit yang masih berusia satu hingga tiga tahun. Usia tersebut masih bisa ditanami padi ladang karena kontur tanah yang belum begitu keras akibat akar sawit dan pencahayaan matahari masih bisa terpenuhi. Pada arena agraria, petani padi ladang dengan modal ekonomi seperti lahan harus berjuang untuk bisa tetap *berume* meskipun itu dilakukan dengan cara yang berbeda sebelum masifnya perkebunan sawit. Arena agraria merupakan ruang sosial yang mana petani padi ladang harus berhadapan dengan ekspansi pekebunan kelapa sawit. Menurut Nurnazmi dan Kholifah (2023), arena dapat dipahami sebagai ruang perebutan berbagai bentuk taruhan, seperti gaya hidup, kekuasaan politik, pendidikan, pekerjaan, hingga tanah. Pada arena ini terkesan tidak netral, pasalnya arena ini diwarnai dengan relasi kuasa, ekonomi dan kebijakan yang lebih berpihak pada komoditas sawit, sedangkan para petani menduduki posisi yang subordinasi. Menurut Anheier, Gerhards, dan Romo

(dalam Ritzer, 2012) di dalam arena posisi agen ditentukan oleh jenis dan besarnya modal yang dimiliki.

Selanjutnya, masyarakat Pangkal Niur meletakkan makna simbolik pada keberadaan hutan. Masyarakat Pangkal Niur sejak dulu sangat menghormati keberadaan hutan. Mereka menganggap hutan sebagai sebuah kebebasan. Artinya ketika masyarakat masih memiliki hutan maka masyarakat akan selalu merdeka ketika ingin menjalani hidupnya apalagi secara partikular dalam konteks aktivitas pertanian. Nilai simbol yang dilekatkan pada hutan inilah bentuk keyakinan masyarakat kalau aktivitas *berume* akan selalu ada. Mereka menyebut hutan rakyat dengan istilah hutan *harminte*. Pada tahun 2014, hutan *harminte* ini statusnya masih hutan milik rakyat. Namun, pada tahun 2016, seluas 400–500 hektar hutan *harminte* masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Maras (TNGM) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016. Seluas 300 hektar dari 400–500 hektar itu dulunya termasuk bagian dari sentra padi ladang. Lelap Selan merupakan wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pangkal Niur sebagai sentranya padi ladang yang kini masuk ke dalam kawasan TNGM. Dinamika ini membuat dilematis sehingga masyarakat turut mempertanyakan kondisi yang sebenarnya. Ungkapan ini disampaikan oleh Kepala Desa Pangkal Niur, ia mengatakan:

“ni kan 2016 ditetapkan sedangkan lahan itu kan sudah diduduki oleh masyarakat dari zaman belanda kan, tiba-tiba ditetapkan oleh negara jadi hutan kawasan kan jadi kadang ade nimbulin konflik, itu yang terjadi saat ini kan yang jadi pertanyaan apakah emang kami sebagai masyarakat sini yang masuk kawasan merambah kawasan atau kategorinya sebaliknya kami yang dimasukkan ke dalam kawasan”
(Kepala Desa Pangkal Niur, wawancara)

Pada intinya, kepala desa mengungkapkan lahan yang masuk ke hutan kawasan dulunya lahan masyarakat sudah sejak dari zaman penjajahan Belanda sehingga kondisi ini bisa terkadang menimbulkan konflik. Maka dari itu, yang menjadi kebingungan apakah masyarakat yang masuk merambah kawasan atau sebaliknya masyarakat yang dimasukkan ke dalam hutan kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat tetap nekat untuk *berume* meskipun lahan yang digunakan masuk ke dalam TNGM. Mereka beranggapan jika tidak *berume* maka kebutuhan pokok berupa beras tidak terpenuhi dan pemerintah tidak mungkin bertanggung jawab akan kebutuhan tersebut.

Kerentanan lain yang belum diuraikan yaitu pelarangan membuka lahan dengan cara dibakar oleh pemerintah. Tentu larangan ini membuat gerak manifestasi tradisi *berume* semakin tidak leluasa, para petani kebingungan dalam membuka lahan, karena kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar tidak bisa lepas dari aktivitas *berume*. Menurut para petani membuka lahan dengan cara dibakar membuat tanaman padi akan tumbuh lebih subur dari bekas hasil pembakaran dibandingkan harus membuka lahan dengan alat berat ekskavator yang dikhawatirkan bisa menghilangkan kesuburan pada tanah. Tentu kebijakan ini tidak sejalan dengan program ketahanan pangan jika itu harus berbasis kearifan lokal. Kepala Dusun Dua Pangkal Niur mengatakan :

“tapi kan program pemerintah tu yang penting tu ketahanan pangan harus digalakkan tapi pembakaran hutan dilarang, antara menteri pertanian dan menteri kehutanan ken la timpang dak nyatu agik kan” (Kepala Dusun Dua Pangkal Niur, wawancara).

Inti dari pernyataan tersebut ialah di antara dua lembaga pemerintahan dianggap memiliki program yang tidak sejalan. Di satu sisi melalui Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal atau sesuai dengan potensi dan kearifan lokal justru di dalam aktivitas *berume* Pangkal Niur tidak sesuai dengan kebijakan kementerian kehutanan terkait dengan pelarangan membuka lahan dengan cara dibakar.

c. Respons Pemerintah terhadap Kerentanan yang Dialami oleh Petani Padi Ladang Pangkal Niur

Dinamika yang dialami oleh para petani padi ladang dalam *berume* di Pangkal Niur merupakan kerentanan yang dikhawatirkan benar-benar akan menggerus tradisi *berume*. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya kerentanan ini hadir dalam sampul yang berbeda-beda mulai dari faktor alam seperti hama dan cuaca, faktor kebijakan seperti arah kebijakan pemerintah cenderung ke padi sawah, dan faktor keterpaksaan petani untuk turut berkebun kelapa sawit karena hanya itu salah satu penghasilan yang menjanjikan untuk saat ini sehingga membuat para petani padi ladang harus benar-benar siap dalam menghadapi kerentanan tersebut. Meskipun secara data dan hasil wawancara jumlah petani dan luas lahan padi ladang terus mengalami pengurangan namun jumlah ini masih cukup tinggi di Desa Pangkal Niur.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengatakan pemerintah saat ini fokus pada pertanian padi sawah. Hal ini dilakukan karena secara produktivitas padi sawah lebih banyak dibandingkan padi ladang. Meskipun demikian pemerintah juga memahami kalau mayoritas masyarakat di Bangka itu petani padi ladang. Sehingga pemerintah turut memberikan strategi dan program untuk para petani padi ladang diantaranya pelepasan varietas lokal. Menurut Sitaresmi dkk., (dalam Nopriansyah, 2024) pelepasan varietas lokal bertujuan untuk 1) untuk mendapatkan legalitas sebagai varietas lokal menjadi varietas unggul regional yang sesuai spesifik lokasi; 2) mendapatkan dasar legalitas bagi kegiatan produksi benih bersertifikat dari varietas tersebut; 3) untuk menyamakan posisi pada pemanfaatan varietas lokal sebagaimana sama dengan varietas unggulan yang sudah dilepas pemerintah; 4) menambahkan nilai secara manfaat dan ekonomis dari benih varietas lokal untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Selain pelepasan, pemerintah juga memiliki program penyediaan pupuk dan pestisida, namun untuk wilayah yang masuk ke dalam hutan kawasan lagi-lagi memiliki kendala untuk bisa memanfaatkan program tersebut.

2. Pembahasan

Berume merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka, yang merepresentasikan ketahanan pangan berbasis tradisi dan budaya. Sistem pertanian ini tidak hanya menjadi praktik produksi pangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam. Dalam konteks ketahanan pangan, *padi berume* menjadi simbol kemandirian masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan tanpa ketergantungan pada produk luar. Proses penanaman hingga panen dilakukan secara kolektif dengan semangat solidaritas, yang sekaligus memperkuat kohesi sosial dan memperkaya identitas budaya masyarakat setempat. Praktik *berume* juga menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi strategi adaptif terhadap tantangan ketahanan pangan di tengah terpaan kerentanan ekonomi dan ekologis. Masyarakat Desa Pangkal Niur tetap mempertahankan sistem ini meskipun dihadapkan pada arus modernisasi, perubahan iklim, dan pergeseran nilai-nilai budaya. Ketahanan pangan yang terwujud melalui tradisi *berume* bukan hanya dilihat dari ketersediaan hasil panen, tetapi juga dari keberlanjutan sistem sosial yang mendukung distribusi pangan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan budaya yang menjadi fondasi ketahanan komunitas.

Namun, di sisi lain, pelestarian tradisi *berume* menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Modernisasi pertanian dengan introduksi varietas unggul komersial telah mengubah pola tanam masyarakat, sementara perubahan gaya hidup generasi muda menyebabkan menurunnya minat terhadap pertanian tradisional. Selain itu, perubahan iklim yang berdampak pada pola musim turut mengancam keberlanjutan praktik ini. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pelestarian yang

lebih terarah, seperti revitalisasi sistem pertanian tradisional melalui pendidikan berbasis budaya, penguatan kelembagaan lokal, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kearifan lokal. Upaya pelestarian tradisi *berume* bukan hanya penting bagi masyarakat Pangkal Niur, tetapi juga relevan secara nasional sebagai model penguatan ketahanan pangan berbasis lokal. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dengan kebijakan pembangunan pangan dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim.

KESIMPULAN

Tradisi *berume* (padi ladang) di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka, tetap bertahan sebagai perwujudan ketahanan pangan lokal di tengah berbagai kerentanan. Motif utama dipertahankannya *berume* adalah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun (*habitus*), alasan rasionalitas yang lebih ekonomis dibandingkan padi sawah, menjadi ketahanan pangan versi lokal, serta nilai gotong royong dan kebersamaan yang dijaga. Manifestasi tradisi ini meliputi: 1) penerapan cara tradisional (*subsistence farming*); 2) penggunaan beras *berume* untuk tradisi lokal (*nisab dan memere/ngebaru*); 3) praktik tumpangsari di sela tanaman sawit muda; dan 4) menjaga hutan yang disimbolkan sebagai kebebasan. Pemerintah daerah (Dinas Pangan dan Pertanian Bangka) merespons dengan pelepasan varietas padi lokal dan penyaluran pupuk/pestisida, meskipun fokus utama kebijakan dan dukungan saat ini lebih condong ke pertanian padi sawah karena produktivitasnya lebih tinggi, dan petani ladang menghadapi kendala kebijakan seperti larangan membakar lahan dan isu kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badanpangan.go.id. (2025, 15 Januari). Badan Pangan Nasional Dukung Kemandirian Pangan dari Desa. Diakses Pada 20 Juni 2025. dari <https://badanpangan.go.id/blog/post/badan-pangan-nasional-dukung-kemandirian-pangan-dari-desa>.
- Bangkakab, bps.go.id. (2021, 26 Februari). Kabupaten Bangka Dalam Angka 2021. Diakses Pada 25 September 2025, dari <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/c6c6e801acedd31fa7c6e87c/kabupaten-bangka-dalam-angka-2021.html>.
- Bangkakab, bps.go.id. (2022, 25 Februari). Kabupaten Bangka Dalam Angka 2022. Diakses Pada 25 September 2025, dari <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/502893d3edd5b641235d50fc/kabupaten-bangka-dalam-angka-2022.html>.
- Bangkakab, bps.go.id. (2023, 28 Februari). Kabupaten Bangka Dalam Angka 2023. Diakses Pada 25 September 2025, dari <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/f47a00e73b843a9eddf6b33d/bangka-regency-in-figures-2023.html>.
- Bangkakab, bps.go.id. (2024, 28 Februari). Kabupaten Bangka Dalam Angka 2024. Diakses Pada 25 September 2025, dari <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/870aea94a38b77b409e63056/kabupaten-bangka-dalam-angka-2024.html>.
- Bangkakab, bps.go.id. (2025, 28 Februari). Kabupaten Bangka Dalam Angka 2025. Diakses Pada 25 September 2025, dari <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/378b66cfb6650effddb9e3ff/kabupaten-bangka-dalam-angka-2025.html>.
- Febriani, D., & Risdayati, R. (2017). Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap di Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ginting, H. S. P. H. (2019). Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata: Analisis *habitus* dan modal dalam arena pendidikan menurut perspektif Pierre Bourdieu. *Sintesis*, 13(1), 47-56.
- Harini, R. (2020). Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan. UGM PRESS.
- Ismoyo, S. L. (2024). Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan dalam Industri Komik Indonesia: Pendekatan Teori Produksi Kultural Pierre Bourdieu. *DeKaVe*, 17(1), 98-109.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

- SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Maras, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas 16.806,91 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam dan Sembilan Puluh Satu Perseratus) Hektar. Jakarta.
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 189-206.
- Marlianto, C. (2025, 20 Januari). Optimalkan Program Swasembada Pangan Hingga 60 Persen, Begini Upaya Pemkab Bangka Selatan. Diakses Pada tanggal 20 Juni 2025. dari <https://bangka.tribunnews.com/2025/01/20/optimalkan-program-swasembada-pangan-hingga-60-persen-begini-upaya-pemkab-bangka-selatan>.
- Nopriansyah, S., Mustikarini, E. D., & Khodijah, N. S. (2024). Pelestarian Varietas Padi Ladang Lokal untuk Pertanian Berkelanjutan: Pelestarian Varietas Padi Lokal Bangka. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 10(1), 1364-1372.
- Nurnazmi, N., & Kholifah, S. (2023). Anatomi Teori Pierre Bourdieu Pada Sosiologi Postmodern. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 6(2), 1308-1321.
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2019). Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Suardi, T. F., Sulistyowati, L., Noor, T. I., & Setiawan, I. (2023). RASIONALITAS PETANI KELAPA SAWIT. Prospek Agribisnis, 2(2).
- Sugiyono. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D - MPKK.Bandung; Alfabeta.
- Sumalia, N. (2020). THE PRESERVATION AND UTILIZATION OF TUKAK TRADITIONAL FOREST IN PANGKAL NIUR VILLAGE COMMUNITIES, BANGKA DISTRICT. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2), 219-232.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. Jakarta.
- Yuliani, F., Rusmawan, D., & Iqbal, M. (2022, December). Keragaan tanaman jagung dan padi gogo dengan pola tanam tumpang sari di kabupaten Bangka Selatan. In Prosiding Seminar Nasional Perlindungan Tanaman (Vol. 1, pp. 70-74).